



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SAMSUL HADI**
2. Jabatan : **KETUA LEMBAGA**
3. NHK : **813173**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.998.320.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 246 m²/300 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 617.510.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m²/125 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 900.100.000
3. Tanah Seluas 1546 m² di KAB / KOTA GROBOGAN, WARISAN Rp. 80.510.000
4. Tanah Seluas 295 m² di KAB / KOTA GROBOGAN, WARISAN Rp. 50.100.000
5. Tanah Seluas 201 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 258.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 199.000.000
3. MOBIL, SUZUKI CARY PICKUP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.750.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.661.481.950



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.933.551.950
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.933.551.950

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.